

DATA STRATEGIS KABUPATEN JEPARA 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JEPARA**

DATA STRATEGIS KABUPATEN JEPARA 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JEPARA**

DATA STRATEGIS KABUPATEN JEPARA 2019

ISBN:

Nomor Publikasi: 33200.2030

Katalog BPS: 1103003.3320

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: x + 63

Naskah:

BPS Kabupaten Jepara

Penyunting:

BPS Kabupaten Jepara

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Jepara

Diterbitkan oleh:

©BPS Kabupaten Jepara

Dicetak oleh:

BPS Kabupaten Jepara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Drs. Manggus Suryono

Penyunting

Agus Winyarto, S.ST

Penulis Naskah

Ahmad Fahrur Rohim, S.ST, MM

Penyusun

Ahmad Fahrur Rohim, S.ST, MM

Infografis

Ahmad Fahrur Rohim, S.ST, MM

Lina Dewi Yunitasari, S.ST

Nawang Indah Cahyaningrum, S.Tr.Stat.

<https://jeparanibooks.guide>

Kata Pengantar



Publikasi “Data Strategis Kabupaten Jepara 2019” merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. Publikasi ini memberikan gambaran tentang data-data yang penting atau strategis sebagai bahan evaluasi pembangunan dan juga untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Adapun cakupan muatan data makro dalam publikasi ini terdiri dari data penduduk, tenaga kerja, pendidikan, kemiskinan, pembangunan manusia, pertanian, dan pertumbuhan ekonomi.

Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Saran dan masukan yang membangun, sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya. Terima kasih dan selamat membaca.

Jepara, Desember 2020
Kepala BPS Kabupaten Jepara,

Drs. Manggus Suryono

Daftar Isi



Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I Penduduk	1
BAB II Ketenagakerjaan.....	7
BAB III Pendidikan.....	15
BAB IV Kemiskinan.....	25
BAB V Pembangunan Manusia	37
BAB VI Pertanian	47
BAB VII Produk Domestik Regional Bruto	57

<https://jeparakab.bps.go.id>

Daftar Tabel



Tabel 1.1	Penduduk Pertengahan Tahun dan Laju Pertumbuhannya Kabupaten Jepara menurut Kecamatan.....	5
Tabel 1.2	Penduduk Kabupaten Jepara menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan dan Sex Ratio Tahun 2019.....	6
Tabel 2.1	Penduduk Kabupaten Jepara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Agustus 2019.....	11
Tabel 2.2	Penduduk Kabupaten Jepara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Usaha Agustus 2019.....	12
Tabel 2.3	Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara dan Eks-Karesidenan Pati 2016-2020 (dalam rupiah/bulan)	13
Tabel 3.1	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2016-2020.....	18
Tabel 3.2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2016-2020.....	19
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2019-2020 (persentase).....	20
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2019-2020 (Persentase)	21
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2020 (Persentase)	22
Tabel 3.6	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2020 (Persentase).....	23
Tabel 4.1	Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Jateng (Maret), 2016-2020.....	31
Tabel 4.2	Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati, 2016-2020 (ribu jiwa).....	32
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati 2016-2020.....	33
Tabel 4.4	Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati, 2014-2018 (rupiah/kapita/bulan).....	34
Tabel 4.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2019-2020.....	35
Tabel 5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara.....	43
Tabel 5.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2016-2020.....	44
Tabel 5.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2017-2019.....	45
Tabel 5.4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2017-2019.....	46

Tabel 6.1	Luas Penggunaan Tanah Sawah dan Tanah Kering di Kabupaten Jepara Tahun 2019.....	51
Tabel 6.2	Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering Menurut Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2019... ..	52
Tabel 6.3	Luas Tanam dan Luas Panen Padi dan Palawija di Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Ha)	53
Tabel 7.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2019 (jutaan rupiah)	60
Tabel 7.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 – 2019 (jutaan rupiah)	61
Tabel 7.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2019.....	62
Tabel 7.4	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2019 (Persen)	63

<https://jeparakab.bps.go.id>

Penduduk Kabupaten Jepara 2019

1.257.912 jiwa

"Berdasarkan Proyeksi Penduduk"

627.007
jiwa



630.905
jiwa



BAB I

Penduduk

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Di Indonesia, sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali yaitu 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir 2010. Dalam publikasi ini disajikan data 208 dan 2019 hasil proyeksi.

Penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah/daerah tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap atau tinggal lebih dari 6 bulan.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara bahkan dunia. Pertambahan penduduk di suatu daerah atau negara pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, yaitu:

❖ **Kematian (*mortalitas*)**

Ada beberapa tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar (*crude death rate*) dan tingkat kematian khusus (*age specific death rate*).

Tingkat kematian kasar (*crude death rate*) adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut.

Tingkat kematian khusus (*age specific death rate*) adalah banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per jumlah penduduk dalam umur yang sama.

❖ **Kelahiran (*fertilitas*)**

Pengukuran tingkat kelahiran ini sulit untuk dilakukan, karena banyak bayi-bayi yang meninggal beberapa saat kelahiran tidak dicatatkan dalam peristiwa kelahiran atau kematian dan sering dicatatkan sebagai lahir mati.

Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita serta pembangunan ekonomi.

❖ **Migrasi**

Migrasi merupakan akibat dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan. Sebagai akibat dari keadaan alam yang kurang menguntungkan

menimbulkan terbatasnya sumber daya yang mendukung penduduk di daerah tersebut. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk suatu daerah dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk. Dengan melihat bentuk piramida penduduk akan diketahui perbandingan jumlah penduduk usia nak-anak, dewasa, dan orang tua pada wilayah yang bersangkutan. Keadaan struktur penduduk yang berbeda-beda akan menunjukkan bentuk piramida yang berbeda pula.

<https://jeparakab.bps.go.id>

Tabel :1.1 Penduduk Pertengahan Tahun dan Laju Pertumbuhannya Kabupaten Jepara menurut Kecamatan

Kecamatan/ <i>District</i>	Jumlah Penduduk 2018	Jumlah Penduduk 2019	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Kedung	80 058	81 176	1,40
020 Pecangaan	87 538	88 759	1,39
021 Kalinyamatan	66 590	67 520	1,40
030 Welahan	77 004	78 077	1,39
040 Mayong	93 011	94 309	1,40
050 Nalumsari	76 295	77 361	1,40
060 Batealit	88 569	89 803	1,39
070 Tahunan	118 837	120 495	1,40
080 Jepara	91 688	92 967	1,39
090 Mlonggo	89 026	90 268	1,40
091 Pakisaji	62 661	63 535	1,39
100 Bangsri	105 453	106 925	1,40
101 Kembang	72 146	73 153	1,40
110 Keling	64 250	65 147	1,40
111 Donorojo	57 825	58 633	1,40
120 Karimunjava	9 649	9 784	1,40
Jumlah/Total	1 240 600	1 257 912	1,40

Sumber: Proyeksi Penduduk

Tabel : 1.2 Penduduk Kabupaten Jepara menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan dan Sex Ratio Tahun 2019

Kecamatan/ <i>District</i>	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Rasio Jenis Kelamin (%)/ <i>Sex Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Kedung	40 311	40 865	81 176	98,64
020 Pecangaan	43 852	44 907	88 759	97,65
021 Kalinyamatan	33 529	33 991	67 520	98,64
030 Welahan	38 574	39 503	78 077	97,65
040 Mayong	46 833	47 476	94 309	98,65
050 Nalumsari	38 022	39 339	77 361	96,65
060 Batealit	44 821	44 982	89 803	99,64
070 Tahunan	61 028	59 467	120 495	102,62
080 Jepara	46 632	46 335	92 967	100,64
090 Mlonggo	45 719	44 549	90 268	102,63
091 Pakisaji	31 868	31 667	63 535	100,63
100 Bangsri	53 631	53 294	106 925	100,63
101 Kembang	35 954	37 199	73 153	96,65
110 Keling	32 186	32 961	65 147	97,65
111 Donorojo	29 116	29 517	58 633	98,64
120 Karimunjawa	4 931	4 853	9 784	101,61
Jumlah/Total	618 422	622 178	1 240 600	99,40

Sumber: Proyeksi Penduduk

Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara Tahun 2019

Perkembangan TPT Kabupaten Jepara



TPAK

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

68,24%



TPT

Tingkat Pengangguran
Terbuka

2,97%

BAB II

Ketenagakerjaan

Salah satu persoalan mendasar dalam aspek ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai pekerja), dan pada waktu bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah Setengah Pengangguran (*under unemployment*) yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal yang bekerja kurang 35 jam selama seminggu. Permasalahan pengangguran dan setengah pengangguran ini merupakan persoalan serius karena dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Dilihat dari penyebabnya, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

1. **Pengangguran struktural** yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Penduduk tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk memasuki sektor baru hingga mereka menganggur. Contoh: Para petani kehilangan pekerjaan karena daerahnya berubah dari daerah agraris menjadi industri.
2. **Pengangguran siklus** adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian (misal terjadi resesi) sehingga menyebabkan berkurangnya permintaan masyarakat (*aggregate demand*).
3. **Pengangguran musiman** adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
4. **Pengangguran friksional** adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja.
5. **Pengangguran teknologi** adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern yang menggantikan tenaga kerja manusia.

Beberapa konsep/definisi yang digunakan dalam ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

a. Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan

tetapi bertujuan untuk menetap.

b. Usia Kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survey dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas usia kerja.

c. Angkatan kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

d. Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.

e. Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup; baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja misalnya, karena cuti, sakit, dan sejenisnya.

Kreteria satu jam (*the one-hour criterion*) digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*Short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya.

Kreteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan pengangguran yang digunakan, dimana pengangguran adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi pengangguran yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Tabel : 2.1 Penduduk Kabupaten Jepara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Agustus 2019

Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Angkatan Kerja</u>	<u>387 644</u>	<u>260 589</u>	<u>648 233</u>
1. Bekerja	376 736	252 258	628 994
2. Pengangguran Terbuka	10 908	8 331	19 239
<i>a. Pernah Bekerja</i>	5 153	3 629	8 782
<i>b. Tidak Pernah Bekerja</i>	5 755	4 702	10 457
<u>Bukan Angkatan Kerja</u>	<u>81 474</u>	<u>220 231</u>	<u>301 705</u>
3. Sekolah	31 255	40 952	72 207
4. Mengurus Rumah Tangga	19 818	165 168	184 986
5. Lainnya	30 401	14 111	44 512
Jumlah	469 118	480 820	949 938
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,81	3,20	2,97

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tabel :2.2 Penduduk Kabupaten Jepara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Usaha Agustus 2019

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehut, Perburuan & Perikanan	47 662	25 875	73 497
B. Pertambangan & Penggalian	3 363	539	3 902
C. Industri Pengolahan	180 689	122 968	303 657
F. Konstruksi	37 972	510	38 482
G. Perdagangan Besan & Eceran	42 599	52 219	94 818
H. Tranfortasi dan Pergudangan	14 036	826	14 862
I. Penyediaan Akomodasi & Makan minum	8 293	20 268	28 561
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1 306	490	1 796
M,N Jasa Perusahaan	6 889	731	7 620
O. Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dll	3 754	1 347	5 101
P. Jasa Pendidikan	12 565	10 561	23 126
Q. Jasa Kesehatan & Keg Sosial	1 582	3 791	5 373
R, S, T, U Jasa Lainnya	9 199	11 856	21 055
D, E, J, L Kategori Lainnya	6 867	277	7 144
Jumlah	376 736	252 258	628 994

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tabel :2.3 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara dan Eks Karesidenan Pati 2016-2020 (dalam rupiah/bulan)

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Jepara</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 738 360</u>	<u>1 879 031</u>	<u>2 040 000</u>
Blora	1 328 000	1 438 100	1 564 000	1 690 000	1 834 000
Rembang	1 300 000	1 408 000	1 535 000	1 660 000	1 802 000
Kudus	1 608 200	1 740 900	1 892 500	2 044 467	2 218 451
Pati	1 310 000	1 420 500	1 585 000	1 742 000	1 891 000

Sumber: Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/58 tahun 2019

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) KABUPATEN JEPARA 2020



7-12 tahun



99,65

13-15 tahun



96,93

16-18 tahun



68,97

BAB III

Pendidikan

Pada dasarnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.

Istilah-istilah dalam pendidikan antara lain;

- a. Angka Melek Huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk total usia 15 tahun ke atas.
- b. Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
- c. Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel: 3.1 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jepara dan Eks Karesidenan Pati Tahun 2016-2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jepara	<u>12,28</u>	<u>12,70</u>	<u>12,71</u>	<u>12,74</u>	<u>12,75</u>
Blora	11,92	12,13	12,14	12,19	12,20
Rembang	12,03	12,04	12,05	12,10	12,11
Kudus	13,19	13,20	13,21	13,22	13,23
Pati	11,92	12,29	12,30	12,41	12,65
Jawa Tengah	12,45	12,57	12,63	12,68	12,70

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Tabel: 3.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Jepara dan Eks Karesinan Pati Tahun 2016-2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Jepara</u>	<u>7,32</u>	<u>7,33</u>	<u>7,43</u>	<u>7,44</u>	<u>7,68</u>
Blora	6,18	6,45	6,46	6,58	6,83
Rembang	6,93	6,94	6,95	7,15	7,16
Kudus	7,85	8,31	8,62	8,63	8,75
Pati	6,83	7,08	7,18	7,19	7,44
JawaTengah	7,15	7,27	7,35	7,53	7,69

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Tabel: 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2019-2020 (persentase)

Kabupaten	2019			2020		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>Jepara</u>	<u>97,79</u>	<u>77,48</u>	<u>59,19</u>	<u>97,51</u>	<u>78,11</u>	<u>59,93</u>
Blora	95,99	76,56	57,21	95,93	76,43	57,23
Rembang	96,67	81,12	55,34	96,54	82,34	56,00
Kudus	97,05	75,38	67,31	97,32	76,25	67,22
Pati	98,30	79,11	62,64	99,38	80,08	63,44
JawaTengah	97,77	79,84	59,35	97,90	80,53	59,74

Sumber : Susenas 2020, diolah

Tabel: 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jepara dan Eks Karesidenan Pati Tahun 2019-2020 (Persentase)

Kabupaten	2019			2020		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jepara	87,65	88,64	87,65	110,40	94,66	88,00
Blora	86,39	95,17	86,39	107,70	96,01	87,30
Rembang	72,99	100,86	72,99	105,93	101,41	74,53
Kudus	91,45	86,49	91,45	105,91	88,32	90,10
Pati	101,67	89,18	101,67	106,89	91,71	101,34
JawaTengah	86,76	91,70	86,76	106,32	93,21	86,83

Sumber : Susenas, diolah

Tabel: 3.5 Angka Patisipasi Sekolah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2020 (Persentase)

Kabupaten	Jepara			Jateng		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	99,78	100,00	99,65	99,76	99,77	99,73
13-15	95,62	96,05	96,93	95,48	96,11	99,37
16-18	68,26	68,47	68,97	68,48	69,65	70,14

Sumber : Susenas 2020, diolah

<https://jeparakab.bps.go.id>

Tabel: 3.6 Angka Patisipasi Sekolah Kabupaten Jepara dan Eks Karesidenan Pati Tahun 2020 (Persentase)

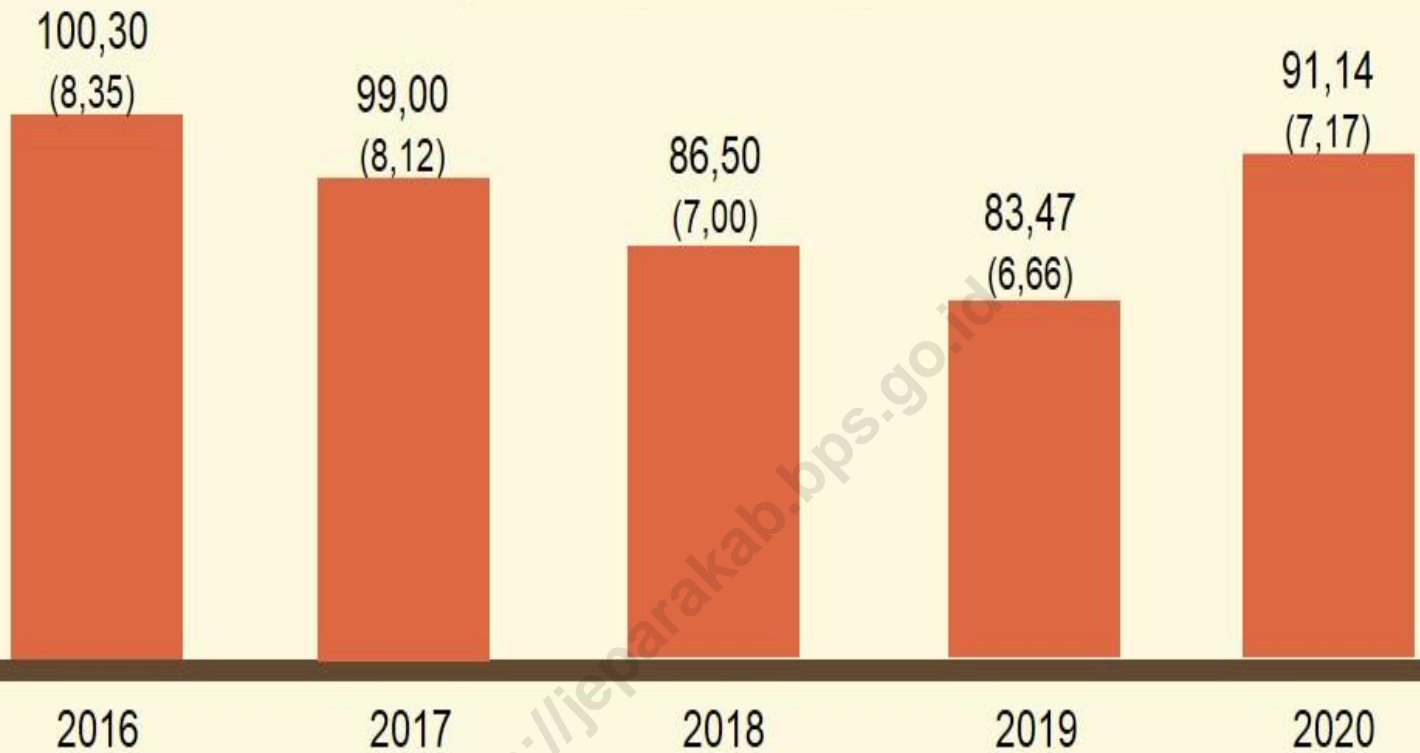
Kabupaten	2020		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Jepara</u>	<u>99,65</u>	<u>96,93</u>	<u>68,97</u>
Blora	99,98	99,04	73,13
Rembang	99,99	98,05	68,97
Kudus	99,75	98,94	73,05
Pati	99,60	96,34	72,51
JawaTengah	99,73	99,37	70,14

Sumber : Susenas 2020, diolah

KEMISKINAN KABUPATEN JEPARA MARET 2020



Jumlah (Ribuan Orang) dan Persentase Penduduk Miskin



Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)



Garis Kemiskinan Maret 2020

Rp407.056,00

(meningkat +Rp20.363,00 dari tahun 2019)



BAB IV

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Kemiskinan merupakan penyebab seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya atau memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kebutuhan hidup ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi, dan distribusi serta letak geografisnya. Kebutuhan minimal hidup antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, *penduduk miskin* adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan(GKNM) sebagai berikut:

$$GK=GKM+GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk setiap provinsi, daerah perkotaan, dan pedesaan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 % penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara adalah Garis Kemiskinan periode lalu di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan,daging,telur,dan susu,sayutran, kacang kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).Penyertaan nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komodity tersebut. Formula dasar dalam menghitung garis kemiskinan makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana:

GKM_{jp} = Garis kemiskinan makana daerah j (sebelum disertakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Parga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j di provinsi p.

J = Daerah (perkotaan dan pedesaan).

P = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disertakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga mplicit rata-rata kalori menurut daerah j dari pendudu referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana:

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k daerah j provinsi p

\overline{HK}_{jp} = harga rata rata kalori didaerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

Dimana :

GKM = kebutuhan makanan didaerah j, yaitu yang menghasilkan energy setara denfgan 2100kilo kalori /kapita /hari atau garis kemiskinan makanan (GKM)

J = daerah (perkotaan dan pedesaan)

P = provinsi p.

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan , sandang,pendiidkan, dan kesehatan.paket komodatif (kelompok pengeluaran) kebutuhan dasar non-makanan diwakli oleh 51 jenis komodatif di perkotaan dan 47 jenis komodatif di pedesaan. GKMN merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan yang meliputi perumahan,sandang,pendidikan,dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan di hitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi /sub-kelompok yang tercatat dalam

data susenas, modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil survei paket komodatif kebutuhan dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per-komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data susenas model konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} \cdot V_{kjp}$$

Dimana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan at ugaris kemiskinan non-makanan daerah j(kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah dan provinsi p (dari sensus modul konsumsi).

r_{jk} = rasio pengeluaran komoditi/ sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

K = jenis komodi yi makanan terpilih.

J = daerah (perkotaan dan perdesaan)

P = Provinsi (perkotaan dan perdesan)

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan garis Kmeiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memilik rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

Dimana:

$\%PM_p$ =% Penduduk miskin di provinsi p.

PM_p =Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

P_p =Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miski untuk level Nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin Provinsi atau:

$$PM_1 = \sum_{p=1}^n PM_p$$

Dimana:

PM_1 =Penduduk miskin Indonesia.

PM_p =Penduduk miskin di provinsi p.

N =Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah :

$$\%PM_1 = \frac{PM_1}{P_1}$$

Dimana :

$\%PM_1$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

PM_1 = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

P_1 = Jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar , ada 3 indikator kemiskinan yang dapat digunakan :

- a. Head Count index (HCI-P₀), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
- b. Indeks kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap index-P₁) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty severity Index-P₂) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluarannya diantara penduduk miskin.

Tabel: 4.1 Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Jateng (Maret), 2016-2020

Tahun	Jepara		Jawa Tengah	
	Jumlah (ribu)	Persentase	Jumlah (ribu)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	100,32	8,35	4 506,9	13,27
2017	98,98	8,5	4 450,7	13,01
2018	86,54	7,00	3 897,2	11,32
2019	83,47	6,66	3 743,23	10,80
2020	91,14	7,17	3 980,90	11,41

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Tabel: 4.2 Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati, 2016-2020 (ribu jiwa)

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
	2016 (Maret)	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jepara	100,3	99,0	86,5	83,47	91,14
Blora	113,9	111,9	102,5	97,86	103,73
Rembang	115,5	115,2	97,4	95,26	100,08
Kudus	64,2	64,4	60,0	58,00	64,24
Pati	144,2	141,7	123,9	118,98	127,37
Jawa Tengah	4 506,9	4 450,7	3 897,2	3 743,23	3 980,90

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Tabel: 4.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Eks Karesidenan Pati 2016-2020

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin				
	2016 (Maret)	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pati	11,65	11,38	9,90	9,46	10,08
Blora	13,33	13,04	11,90	11,32	11,96
Rembang	18,54	18,35	15,41	14,95	15,60
Kudus	7,65	7,59	6,98	6,68	7,31
Jepara	8,35	8,12	7,00	6,66	7,17
Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,80	11,41

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Tabel: 4.4 Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara dan Eks Karesidenan Pati, 2014-2018 (rupiah/kapita/bulan)

Kabupaten	Garis Kemiskinan				
	2016 (Maret)	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jepara	341 754	355 607	371 296	386 693	407 056
Blora	279 972	291 114	308 520	335 837	353 259
Rembang	338 986	354 440	365 443	384 561	403 932
Kudus	356 951	373 224	393 078	406 470	429 666
Pati	377 442	393 817	414 316	423 922	445 913
Jawa Tengah	317 348	333 224	350 875	369 385	395 407

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Tabel: 4.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Tahun 2019-2020

Kabupaten	2019		2020	
	(P1)	(P2)	(P1)	(P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jepara	<u>0,64</u>	<u>0,10</u>	<u>0,60</u>	<u>0,07</u>
Blora	1,59	0,34	1,39	0,21
Rembang	2,32	0,48	2,44	0,53
Kudus	0,83	0,17	1,01	0,18
Pati	1,47	0,31	1,37	0,26
Jawa Tengah	1,53	0,30	1,72	0,34

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jepara Tahun 2020



Umur Harapan Hidup
75,84 Tahun



Harapan Lama Sekolah
12,75 Tahun

Rata-rata Lama Sekolah
7,68 Tahun



Pengeluaran Per Kapita Per tahun yang Disesuaikan
Rp 10,34 Juta



IPM Jepara termasuk kategori Tinggi

Perkembangan IPM Jepara



BAB V

Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan dapat dicapai karena ada peranan dari manusia, sebab manusia sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus pemanfaat dari pembangunan itu sendiri, atau dapat dikatakan bahwa manusia sebagai penentu keberhasilan pembangunan.

Agar pembangunan dapat berjalan secara kontinyu/terus menerus sesuai dengan kemajuan zaman, maka haruslah disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara teoritis bahwa jumlah sumber daya manusia yang besar tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas yang memadai sangatlah tidak mungkin menghasilkan/*out put* yang optimum. Upaya peningkatan sumber daya manusia haruslah secara menyeluruh meliputi bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan dibidang kesehatan.

Seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi sudah semakin pandai dan kritis, hal itu merupakan modal yang cukup baik bila dikelola dengan baik dan benar dengan memberikan pemahaman akan pentingnya data statistik dan indikator-indikator statistik yang berguna bagi pembangunan, sehingga masyarakatpun tidak menilai sesuatu dari kaca matanya sendiri atau yang hanya menguntungkan dirinya sendiri saja yang dianggap baik.

Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada didaerah tidak bisa dilakukan dengan baik apabila tidak didukung dengan data-data statistik atau indikator-indikator untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan dan informasi guna perencanaan pembangunan yang akan datang.

Untuk mengukur tingkat pencapaian suatu pembangunan dari berbagai perspektif digunakan berbagai macam indikator seperti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Gini Ratio, Indek Mutu Hidup (IMH), Pola Konsumsi, Indeks Kesehatan Ibu dan Anak, dan masih banyak indikator lainnya.

Prof.Moris mensponsori penggunaan indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen yaitu: Tingkat Kematian Bayi/*Infant Mortality Rate* (IMR), Angka Harapan Hidup (*Life Expectation at Age 0*), dan Tingkat Melek Huruf/*Literacy Rate*. Yang kemudian dikenal dengan *Physical Quality of Life Index (PQLI)* dan di Indonesia dikenal dengan nama *Indeks Mutu Hidup (IMH)*.

Pada waktu itu IMH sangat cocok digunakan karena mudah dalam menyusunnya, tetapi karena dipandang masih banyak kelemahan dari IMH yaitu tidak memperhitungkan sektor ekonomi yaitu daya beli masyarakat.

Menjelang Tahun 2000 sebuah badan international yang bernaung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu *The United Nation Development Program (UNDP)* memperkenalkan dan mengembangkan suatu indeks komposit yang memasukkan unsur keberhasilan pembangunan ekonomi dan keberhasilan sosial, yaitu *Human Development Index (HDI)* dan di Indonesia dikenal dengan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, untuk menyempurnakan dan menggantikan *Physical Quality of Life (PQLI)* atau *Indeks Mutu Hidup (IMH)* sebagai pengukur keberhasilan pembangunan manusia, yang selanjutnya diikuti dan menjadi acuan bagi negara- negara di dunia.

Konsep Pembangunan Manusia.

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*The ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*Principal means*) untuk mencapai tujuan itu.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah:

1. Produktivitas (*Productivity*)
2. Pemerataan (*Equity*)
3. Kestinambungan (*Sustainability*)
4. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

Produktivitas (*productivity*)

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitasnya dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan peningkatan pendapatan dan pekerjaan. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

Pemerataan (*Equity*)

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup.

Kesinambungan (*Sustainability*)

Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan (alam) harus selalu dirawat dan diperbaharui (*Replenished*).

Pemberdayaan (*Empowerment*)

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, karenanya pembangunan harus oleh penduduk bukan hanya untuk penduduk.

Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral (*People centered development*) sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. maka dalam kerangka ini perlu diupayakan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan dalam banyak aspek sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang secara implisit juga mengandung makna pemberdayaan penduduk.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak hanya berhenti sampai disana, pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi, sosial, sampai pada kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, serta menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mempunyai dua sisi, pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan. Kedua adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik. Jika kedua sisi tersebut tidak seimbang maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat (UNDP, 1995:11)

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori-teori pembangunan ekonomi konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel: 5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

Tahun	Usia Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran disesuaikan (ribu)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	75,67	12,28	7,32	9 695	70,25
2017	75,68	12,70	7,33	9 745	70,79
2018	75,71	12,71	7,43	10 169	71,38
2019	75,74	12,74	7,44	10 609	71,88
2020	75,84	12,75	7,68	10 343	71,99

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Tabel: 5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jepara	<u>70,25</u>	<u>70,79</u>	<u>71,38</u>	<u>71,88</u>	<u>71,99</u>
Blora	66,61	67,52	67,95	68,65	68,84
Rembang	68,60	68,95	69,46	70,15	70,02
Kudus	72,94	73,84	74,58	74,94	75,00
Pati	69,08	70,12	70,71	71,35	71,77
Jawa Tengah	69,49	69,98	71,12	71,73	71,87

Sumber : BPS Provinsi Jateng
 Ket: IPM dihitung menggunakan metode baru

Tabel: 5.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2017-2019

Tahun	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jepara	<u>90,39</u>	<u>90,66</u>	<u>90,91</u>
Blora	83,55	83,79	83,96
Rembang	86,18	86,49	86,85
Kudus	92,68	92,89	92,90
Pati	91,98	91,50	91,60
Jawa Tengah	91,94	91,95	91,89

Sumber : BPS Provinsi Jateng

Ket : IPG dihitung menggunakan metode baru

Tabel: 5.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara dan Eks-Karesidenan Pati Tahun 2017-2019

Tahun	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jepara	<u>48,76</u>	<u>50,62</u>	<u>58,20</u>
Blora	70,52	70,72	65,59
Rembang	72,45	73,12	65,79
Kudus	62,02	62,07	65,24
Pati	67,96	66,55	66,99
Jawa Tengah	75,10	74,03	75,24

Sumber : BPS Provinsi Jateng
 Ket : IDG dihitung menggunakan metode baru

LUAS TANAM DAN LUAS PANEN TANAMAN PADI DAN JAGUNG DI KABUPATEN JEPARA 2019

PADI

Luas Tanam 36.866 Ha

Luas Panen 43.346 Ha



JAGUNG



8.327 Ha

Luas Tanam

8.296 Ha

Luas Panen



BAB VI

Pertanian

Data Pertanian yang disajikan dalam publikasi ini adalah data luas tanam dan luas panen dari tanaman padi/palawija.

Luas Panen

Luas panen adalah luas tanaman padi/palawija yang dipanen pada suatu wilayah (areal) dalam periode pengumpulan data (setahun) dan merupakan luas bersih (tidak termasuk galeng/pematang).

Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan oleh mantri pertanian/KCD (Kepala Cabang Dinas Kecamatan) melalui Survei Pertanian (SP). Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan area Kecamatan di Seluruh Jepara.

Produksi

Pengumpulan data produktivitas (hasil per hektar) tanaman padi dan palawija dilakukan melalui survei ubinan. Periode pengumpulan data dilakukan setiap *subround* (empat bulanan) dengan petugas lapangan KSK (koordinator statistik kecamatan) dan mantri tani.

Metode pengambilan sampel ubinan dilakukan dalam dua tahap (*two stage sampling*), sebagai berikut:

a. Tahap I

Memilih sejumlah BS (blok sensus) secara pps (*proportional probability to size*) dengan *size* banyaknya rumah tangga padi/palawija. Pada BS terpilih kemudian dilakukan pendaftaran (*listing*) rumah tangga untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan penanaman padi dan palawija.

b. Tahap II

Berdasarkan hasil *listing* tersebut, dipilih sejumlah petak yang akan dipanen pada *subround* tertentu. Pada petak terpilih kemudian dilakukan pemanenan pada plot ubinan berukuran 2,5 m x 2,5 m.

Dalam satu tahun, data produksi padi dan palawija disajikan sebanyak 4 (empat)

kali dengan status angka yang berbeda, yaitu:

- a. Angka Ramalan I (ARAM I) adalah data produksi pada tahun berjalan dan seluruhnya (januari-desember) masih merupakan angka ramalan, disajikan pada awal bulan maret.
- b. Angka Ramalan II (ARAM II) adalah data produksi tahun berjalan, terdiri dari realisasi januari-april dan angka ramalan mei-desember, disajikan pada awal bulan juli. Setelah ARAM II disajikan, maka ARAM I yang disajikan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- c. Angka Sementara (ASEM) adalah data produksi tahun sebelumnya dan merupakan angka realisasi januari-desember, disajikan pada awal bulan maret tahun berikutnya (bersamaan dengan penyajian ARAM I). Setelah ASEM disajikan maka ARAM II tidak berlaku lagi. Karena penghitungan ASEM dilakukan pada awal tahun, kondisi pemasukan dokumen secara nasional biasanya belum 100 % sehingga data yang disajikan belum final.
- d. Angka Tetap (ATAP) adalah data produksi tahun sebelumnya dan merupakan angka realisasi, disajikan pada awal juli tahun berikutnya bersamaan dengan penyajian ARAM II. Setelah ATAP disajikan, maka ASEM tidak digunakan lagi.

Tabel 6.1 Luas Penggunaan Tanah Sawah dan Tanah Kering di Kabupaten Jepara Tahun 2019

Penggunaan Tanah		Luas (Ha)
(1)		(2)
I. TANAH SAWAH :		<u>25 650,850</u>
I. 1.	Pengairan Teknis	3 212,770
I. 2.	Pengairan Setengah Teknis	4 087,470
I. 3.	Pengairan Sederhana PU	15 839,920
I. 4.	Pengairan Non PU	-
I. 5.	Tadah Hujan	2 510,690
I. 6.	Pasang Surut	-
I. 7.	Tanah Sawah, Lebak, Polder, dll.	-
I. 8.	Tanah Sawah Yang Sementara Tidak Diusahakan	-
II. TANAH KERING :		<u>74 762,344</u>
II. 1.	Tanah Untuk Bangunan & Halaman Sekitarnya	45 010,180
II. 2.	Tegal	3 374,010
II. 3.	Padang Rumput	8,000
II. 4.	Rawa Yang Tidak Ditanami	21,000
II. 5.	Tambak	1 045,764
II. 6.	Kolam	22,316
II. 7.	Tanah Yang Sementara Tidak Diusahakan	322,243
II. 8.	Tanah Untuk Tanaman Kayu-kayuan	1 295,356
II. 9.	Hutan Negara	17 518,164
II.10.	Perkebunan Negara	3 942,665
II.11.	Tanah Lainnya (Jalan, Sungai, Kuburan, Tanah Gege, Cemetery, Gege Land, Sports Field, and others)	2 202,646
Jumlah		100 413,194

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara

Tabel 6.2 Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering Menurut Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2019

Kecamatan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kedung	1 692,110	0,000	1 692,110
Pecangaan	1 553,840	1,000	1 554,840
Kalinyamatan	1 211,920	170,560	1 382,480
Welahan	1 612,030	0,000	1,612.030
Mayong	2 603,780	468,070	3,071.850
Nalumsari	2 189,180	304,140	2,493.320
Batealit	1 839,730	29,360	1,869.090
Tahunan	833,140	0,000	833.140
Jepara	373,210	120,760	493.970
Mlonggo	1 127,136	323,280	1,450.416
Pakis Aji	1 412,800	825,330	2,238.130
Bangsri	2 521,076	366,104	2,887.180
Kembang	2 314,010	259,580	2,573.590
Keling	1 931,790	224,850	2,156.640
Donorojo	2 414,540	280,976	2,695.516
Karimunjawa	20,560	0,000	20.560
Jumlah	25 650,852	3374,010	29,024.862

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

Tabel: 6.3 Luas Tanam dan Luas Panen Padi dan Palawija di Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Ha)

Kecamatan	Padi		Jagung	
	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kedung	2 168	3 235	-	-
Pecangaan	1 816	2 747	19	20
Kalinyamatan	2 131	2 419	204	184
Welahan	2 581	2 964	454	445
Mayong	2 945	3 657	386	394
Nalumsari	4 058	4 642	675	613
Batealit	2 440	2 897	1 261	1 274
Tahunan	1 333	1 475	87	90
Jepara	661	701	24	24
Mlonggo	2 143	2 090	140	140
Pakis Aji	1 578	1 976	284	291
Bangsri	3 424	3 591	1 009	1 010
Kembang	2 621	3 019	1 860	1 857
Keling	3 553	4 176	1 041	996
Donorojo	3 405	3 733	882	956
Karimunjawa	12	25	-	-
Jumlah / Total	36 866	43 346	8 327	8 296

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara

Tabel 6.3: Lanjutan

Kecamatan	Ketela Pohon		Ketela Rambat	
	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kedung	106	53	-	-
Pecangaan	123	41	-	-
Kalinyamatan	111	110	-	-
Welahan	2	-	1	1
Mayong	1 158	1 264	-	-
Nalumsari	252	382	-	-
Batealit	1 066	696	-	-
Tahunan	161	136	-	-
Jepara	6	23	3	3
Mlonggo	242	207	-	-
Pakis Aji	281	331	-	-
Bangsri	396	672	2	2
Kembang	1 458	1 414	-	-
Keling	5	65	3	3
Donorojo	1 410	1 365	-	-
Karimunjava	-	-	-	-
Jumlah / Total	6 777	6 759	9	9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara

Tabel 6.3: Lanjutan

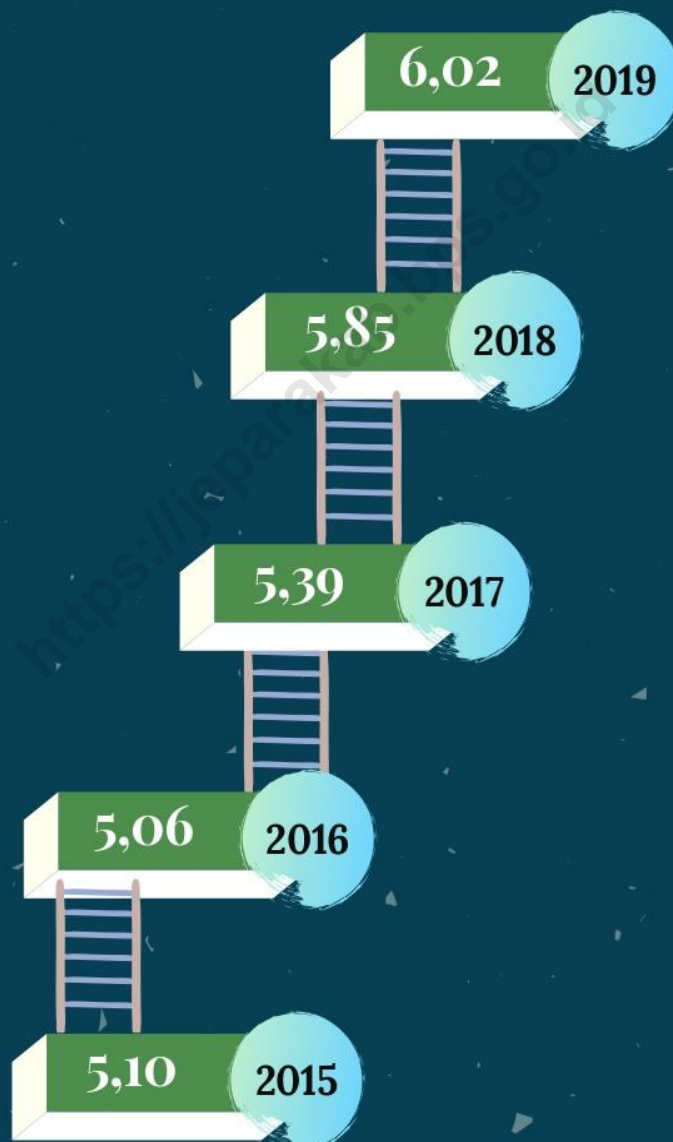
Kecamatan	Kacang Tanah		Kedelai	
	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kedung	-	-	-	38
Pecangaan	13	14	-	-
Kalinyamatan	5	7	-	-
Welahan	-	-	1	-
Mayong	259	298	-	-
Nalumsari	14	9	-	-
Batealit	1,084	1,134	-	9
Tahunan	38	38	-	-
Jepara	16	21	-	-
Mlonggo	10	10	12	4
Pakis Aji	619	619	-	-
Bangsri	146	144	32	2
Kembang	460	451	-	-
Keling	332	327	-	-
Donorojo	116	116	-	-
Karimunjava	-	-	-	-
Jumlah / Total	3,111	3,186	44	52

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara

PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN JEPARA 2015 - 2019

(PERSEN)



BAB VII

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara series, memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi makro dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian regional akan lebih jelas. Bagi pengguna data akan lebih memberikan manfaat untuk berbagai kepentingan seperti untuk perencanaan, evaluasi, maupun untuk kajian.

Pembangunan ekonomi yang telah dicapai pada masa-masa yang lalu perlu dilihat dan dinilai hasil dan implikasinya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan pembangunan yang makin pesat dan meluas di segala bidang, data statistik terasa semakin diperlukan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel : 7.1

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017 – 2019 (jutaan rupiah)**

LAPANGAN USAHA		2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 608 795,03	3 805 518,69	3 949 098,78
B	Pertambangan dan Penggalian	508 531,59	544 806,43	576 735,22
C	Industri Pengolahan	8 912 818,77	9 742 644,56	10 471 691,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25 483,09	28 093,48	31 279,64
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	15 664,16	16 490,44	17 535,30
F	Konstruksi	1 759 082,19	1 948 282,74	2 176 428,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 334 934,02	4 681 152,10	5 066 090,21
H	Transportasi dan Pergudangan	955 700,44	1 030 469,65	1 141 010,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 049 503,70	1 148 311,65	1 283 545,45
J	Informasi dan Komunikasi	663 711,83	756 743,79	853 538,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	575 840,27	616 595,92	647 719,27
L	Real Estate	397 146,53	428 930,45	468 323,70
M,N	Jasa Perusahaan	131 206,97	147 560,52	171 849,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	624 080,27	650 170,62	677 617,39
P	Jasa Pendidikan	1 400 937,41	1 549 571,47	1 710 822,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	254 135,00	280 378,66	306 155,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	567 806,21	619 557,17	681 149,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		25 785 377,48	27 995 278,34	30 230 590,69

Sumber: BPS Kabupaten Jepara

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 7.2

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017 – 2019 (jutaan rupiah)**

LAPANGAN USAHA		2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 515 714,39	2 565 664,84	2 613 851,18
B	Pertambangan dan Penggalian	329 290,83	339 271,58	351 751,50
C	Industri Pengolahan	6 348 736,24	6 731 892,30	7 108 961,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21 888,17	23 265,99	25 590,73
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	14 230,56	14 820,50	15 475,11
F	Konstruksi	1 266 764,85	1 342 702,07	1 445 539,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 419 951,77	3 612 573,62	3 827 388,10
H	Transportasi dan Pergudangan	832 670,28	890 359,66	966 640,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	814 031,02	882 932,13	976 197,46
J	Informasi dan Komunikasi	645 485,66	736 067,42	821 617,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	411 580,30	428 806,99	443 409,13
L	Real Estate	346 025,78	364 321,22	389 682,45
M,N	Jasa Perusahaan	100 018,23	108 946,68	122 432,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	434 858,05	447 138,26	459 729,50
P	Jasa Pendidikan	911 469,01	984 888,46	1 060 169,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188 378,36	204 721,55	219 056,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	454 242,31	491 881,90	536 788,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		19 055 335,81	20 170 255,17	21 384 282,93

Sumber: BPS Kabupaten Jepara

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel: 7.3

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Jepara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2017 – 2019**

LAPANGAN USAHA		2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,00	13,59	13,06
B	Pertambangan dan Penggalian	1,97	1,95	1,91
C	Industri Pengolahan	34,57	34,80	34,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	6,82	6,96	7,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,81	16,72	16,76
H	Transportasi dan Pergudangan	3,71	3,68	3,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,10	4,25
J	Informasi dan Komunikasi	2,57	2,70	2,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	2,20	2,14
L	Real Estate	1,54	1,53	1,55
M,N	Jasa Perusahaan	0,51	0,53	0,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	2,32	2,24
P	Jasa Pendidikan	5,43	5,54	5,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	1,00	1,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,20	2,21	2,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Jepara

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel: 7.4

**Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2019 (Persen)**

LAPANGAN USAHA		2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,45	1,99	1,88
B	Pertambangan dan Penggalian	4,89	3,03	3,68
C	Industri Pengolahan	5,22	6,04	5,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,41	6,29	9,99
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	6,89	4,15	4,42
F	Konstruksi	7,45	5,99	7,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,93	5,63	5,95
H	Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,93	8,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	8,46	10,56
J	Informasi dan Komunikasi	13,74	14,03	11,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,45	4,19	3,41
L	Real Estate	5,88	5,29	6,96
M,N	Jasa Perusahaan	9,25	8,93	12,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,87	2,82	2,82
P	Jasa Pendidikan	5,34	8,06	7,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,54	8,68	7,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,15	8,29	9,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,39	5,85	6,02

Sumber: BPS Kabupaten Jepara

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JEPARA***

Komplek Perkantoran, Jl. Ratu Kalinyamat, Demaan VI, Jepara
Email: jepara3320@bps.go.id